



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Buton Utara dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Buton utara.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip pemberian bantuan keuangan;
- c. sasaran penggunaan bantuan keuangan;
- d. besaran dan penerima bantuan keuangan;
- e. mekanisme pencairan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

f

### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus; dan
- b. terjaminnya kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

## BAB II

### PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

## BAB III

### SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 6

- (1) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa diperuntukan untuk insentif Tokoh Agama.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan
- (3) Tokoh Agama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Imam;
  - b. Khotib;
  - c. Pendeta/Pemangku;
  - d. Moji
  - e. Tunggu; dan
  - f. Guru Ngaji.

## BAB IV

### BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 7

Besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp2.448.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

*f*

#### Pasal 9

- (1) Pengalokasian besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (2) Besaran insentif Tokoh Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (3) Disamping insentif yang disebutkan pada ayat (2), Tokoh Agama dapat diberikan tunjangan melalui anggaran ADD yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di desa karena mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tokoh Agama.
- (4) Besaran insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 10

Penerima bantuan keuangan khusus yakni seluruh Desa yang ada di Daerah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Desa.

### BAB V TATA CARA PENCAIRAN

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Khusus mengacu pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat;
  - b. Camat memverifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintahan Desa;
  - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
  - d. Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Dinas memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa; dan
  - e. Berdasarkan hasil verifikasi ulang, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan.

### BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun

- anggaran berjalan; dan
- c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan formal penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan monitoring dan evaluasi teknis terkait pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 4-01-2024

BUPATI BUTON UTARA,





MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	M. Hardy	Sekda	
2.	MANSUR	AS-F	
3.	Jumadil	Bag. Hum	
4.	Analisa	DAPIS PMO	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
 KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI	INAW	HATIB	PERDETA/PEMANGRU	MOJI/LK/3 ONG	TUNGGU	GURU KOAH	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH PER TAHUN
<b>KECAMATAN BONEGUNU</b>								
1	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
2	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
3	500,000	500,000	1,000,000	900,000	300,000	300,000	3,500,000	42,000,000
4	500,000	500,000	1,500,000	900,000	300,000	300,000	4,000,000	48,000,000
5	500,000	500,000	2,000,000	900,000	300,000	300,000	4,500,000	54,000,000
6	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
7	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
8	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
9	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
10	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
11	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
12	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
13	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
<b>KECAMATAN KAMBOWA</b>								
1	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
2	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
3	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
4	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
5	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
6	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
7	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
8	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
9	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
10	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
<b>KECAMATAN WAKORUMBA UTARA</b>								
1	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
2	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
3	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
4	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
5	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
6	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
7	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
8	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOKASI	IBAM	HATIB	PERDETA/PEMANGKU	MOJIT/IK/3 ORG	TUNGGU	GURU NGAJI	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH PER TAHUN	
9	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	3,000,000	36,000,000
10	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
11	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
<b>KECAMATAN KULISUSU</b>									
1	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
2	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
3	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
4	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
5	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
6	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
7	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
8	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
9	500,000	500,000	500,000	1,000,000	900,000	300,000	300,000	3,500,000	42,000,000
10	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
11	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
12	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
13	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
14	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
15	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
16	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
<b>KECAMATAN KULISUSU UTARA</b>									
1	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
2	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
3	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
4	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
5	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
6	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
7	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
8	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
9	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
10	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
11	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
12	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
13	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
14	500,000	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000




2

LOKASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN KULISU BARAT	IMAM	HATIB	PEDETA/PEMANGKU	MOAJI/LK/3 ORG	TUNGGU	GURU NGAJI	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH PER TAHUN
1	DESA RAHMAT BARU	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
2	DESA SOLOY AGUNG	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
3	DESA KOTAWO	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
4	DESA BUMI LAPERO	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	3,000,000	36,000,000
5	DESA DAMPALA JAYA	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
6	DESA KASULATOMBI	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
7	DESA KARYA BAKTI	500,000	500,000	2,000,000	900,000	300,000	300,000	4,500,000	54,000,000
8	DESA MARGA KARYA	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
9	DESA KARYA MULYA	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
10	DESA LABULANDA	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
11	DESA LAMBALE	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
12	DESA LAPANDEWA	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
13	DESA LAUKI	500,000	500,000		900,000	300,000	300,000	2,500,000	30,000,000
14	DESA MEKAR JAYA	500,000	500,000	500,000	900,000	300,000	300,000	3,000,000	36,000,000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>39,000,000</b>	<b>39,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>70,200,000</b>	<b>23,400,000</b>	<b>23,400,000</b>	<b>204,000,000</b>	<b>2,448,000,000</b>

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

1. 
2. ~~Angun~~ Acc. 5 
3. Jumadil Bag. Hkm 
7. Anulis Ka Dany X 